

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan atas sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya laut, maupun keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya dan tersebar secara luas pada setiap pulau-pulau di Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki tersebut dapat menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi bagi Indonesia. Sumber kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tersebut dapat dioptimalkan salah satunya melalui sektor pertanian (komoditas primer). Sektor pertanian masih menjadi andalan penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar (Widyawati, 2017)

Indonesia sebagai Negara yang dikenal agraris, yang mengandalkan sektor pertanian, sektor pertanian meliputi beberapa subsektor yaitu subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura subsektor perikanan, subsektor peternakan dan subsektor kehutanan. sebagai salah satu sektor dominan sangat membutuhkan banyak tenaga kerja. Karena sebagai sektor penting, pembangunan sektor pertanian ditujukan untuk meningkatnya produksi pertanian guna terpenuhinya kebutuhan pangan dan industri dalam negeri peningkatan ekspor serta meningkatnya pendapatan petani memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan serta menjadi basis dari pertumbuhan dimasyarakat terlebih masyarakat pedesaan (Rompas et al, 2015).

Pangan adalah komoditas penting bagi bangsa Indonesia, dimana pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi pemerintah

serta masyarakat secara bersama-sama. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan menyebutkan Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka. Sektor pertanian sebagai penghasil pangan sangat perlu diperhatikan.

Dilihat dari ketersediaan lahan, sumber daya manusia (petani) serta proses produksi dan distribusinya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah (Prabandari et. al, 2013).

Sebagai bahan makanan pokok, beras akan terus mempunyai permintaan pasar yang meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dari sisi petani, selama air tercukupi, petani Indonesia hampir bisa dipastikan dapat menanam padi. Karena bertanam padi sudah menjadi bagian hidup, selain karena untuk ketahanan pangan keluarga, juga sebagai sumber pendapatan rumah tangga, oleh karena itu usaha tani padi akan terus dilakukan petani (Damayanti,2013) dalam (Swastika et al., 2007).

Sebagai bahan makanan pokok atau kebutuhan dasar untuk hidup, permintaan pasar akan beras akan terus sejalan dengan pertambahan penduduk. Petani-petani Indonesia hampir bisa dipastikan dapat menanam padi selama air tercukupi karena bertanam padi sudah menjadi bagian hidup masyarakat, selain karena untuk ketahanan pangan keluarga, juga sebagai sumber pendapatan rumah tangga (Toua,2017) dalam (Swastika et al., 2016).

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi

oleh negara maupun masyarakat, karena pangan merupakan hak azazi bagi setiap individu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996).

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi yang cukup besar dibidang pertanian dan memiliki beragam komoditas pertanian unggulan seperti kelapa sawit, karet dan padi. Komoditas yang terus di kembangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah padi. Pengembangan komoditi tanaman padi masih menjadi perhatian. Hal ini di dukung dengan kondisi lingkungan yang cukup ideal untuk pertumbuhan padi sawah. Hal ini mengingat bahwa tanaman padi sebagai sumber makanan pokok utama pada masyarakat Provinsi Jambi.

Usaha pengembangan komoditi padi dengan peningkatan budidaya padisawah. Hal ini dapat di lihat perkembangan luas, produksi dan produktivitas padi sawah di Provinsi Jambi dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Panen, Produksi, Produktivitas Tanaman Padi Sawah di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

No	Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	2017	140.129	678.127	4,8
2	2018	140.992	729.424	5,1
3	2019	69.536	309.933	4,4
4	2020	84.773	386.415	4,5
5	2021	64.412	298.149	4,6
Jumlah		499.842	2.402.048	23,4

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi 2022

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah di Provinsi Jambi dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuansi. Adapun luas panen, produksi dan produktivitas tertinggi terjadi pada tahun

2018 sedangkan terendah pada tahun 2021. Ini dikarenakan terjadinya penurunan signifikan pada luas panen pada tahun 2019, penurunan luas panen sebesar 49,31% dari luas panen sebelumnya. Sehingga menyebabkan penurunan. Pada tahun 2020, luas panen padi mulai meningkat sebesar 15.237 ha, diikuti peningkatan produksi dan produktivitas.

Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki luas lahan padi terbesar. Adapun berikut adalah luas panen, luas tanam, dan produksi padi sawah di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2021

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Kerinci	18.028,6	97.617,8	5,41
Marangin	5.898,2	24.953,7	4,23
Sarolangun	4.041,1	14.854	3,67
Batang Hari	5.422,9	23.663,4	4,36
Muaro Jmbi	4.130	16.018,1	3,87
Tanjab Timur	7.423,5	31.483,9	4,24
Tanjab Barat	6.719	28.966,1	4,31
Tebo	4.845	23.749,6	4,91
Bungo	4.401	15.946,2	2,62
Kota Jambi	367,2	1.590,1	4,33
Sungai Penuh	5.966,4	37.973,6	6,36
Total	84.772,9	316.816,8	4,71

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Jambi 2022

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Merangin memiliki luas panen padi sawah terbesar ke-5 di Provinsi Jambi sebesar 5.898,2 ha dengan produksi 24.953,7 ton dan produktivitas sebesar 42,3 ton/ha, hal ini membuat kabupaten merangin berpotensi meningkatkan produktivitas padi sawah di karenakan lahan yang terus meningkat. Kecamatan Pangkalan Jambu adalah salah satu kecamatan yang rata-rata masyarakatnya merupakan petani padi sawah di Kabupaten Merangin, akan tapi

lahan-lahan sawah di Kecamatan Pangkalan Jambu banyak di alih fungsikan menjadi lahan pertambangan tanpa izin (PETI) pertambangan ilegal yang di lakukan masyarakat di lahan swah mengakibatkan lahan sawah menjadi rusak sehingga tidak dapat melakukan pertanian padi sawah.

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang ada di kecamatan pangkalan jambu dengan menggunakan alat berat di lakukan di lahan sawah produktif sehingga terjadinya kerusakan terhadap lahan sawah tersebut dan juga terjadi pencemaran air, tanah, udara, suara dan lain sebagainya.

Pada tahun 2016 hingga sekarang hasil dari penembangan emas tanpa izin (PETI) semakin menurun, sementara itu lahan persawahan sudah mulai tidak tersedia lagi, maka dari itu masyarakat mulai membenahi kembali lahan sawah yang telah rusak menjadi seperti dulu lagi.

Sangat di sayangkan karena Kecamatan Pangkalan Jambu mempunyai potensi yang cukup besar dalam mengembangkan komoditas padi yang didukung oleh tanah dan irigasi yang baik. Data perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah pada tahun 2012-2021 di Kecamatan Pangkalan Jambu dapat di lihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Areal, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah di Kecamatan Pangkalan Jambu Tahun 2012-2021

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2012	1700	8294	4,87
2013	1307	6179	4,72
2014	456	2194	4,81
2015	188	908	4,83
2016	683	3333	4,88
2017	476	2277	4,78

2018	913	4903	5,37
2019	1181	5754	4,87
2020	913	4959	5,43
2021	957	5627	5,88

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Merangin 2022

Tabel 3 menjelaskan bahwa panen padi sawah pada tahun 2012-2021 mengalami penurunan dari luas panen 1.700 ha menjadi 975 menurun sebesar 743ha atau 43,7%. Dari total luas panen 10 tahun terakhir. Hal ini terjadi di karenakan alih fungsi lahan sawah menjadi pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang mengakibatkan lahan-lahan persawahan menjadi rusak dan tidak bisa di jadikan sawah kembali, pertambangan emas tanpa izin ini di lakukan dari tahun 2011-2017. Adapun luasan lahan produktif padi sawah sebelum dan sesudah penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Baru Pangkalan Jambu dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Lahan Produktif Padi Sawah Sebelum dan Sesudah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Baru Pangkalan Jambu Tahun 2018 - 2022

Tahun	Lahan PETI (Ha)	Lahan Sisa PETI (Ha)	Lahan Yang Sudah Menjadi Lahan Padi Sawah
2018	67	43	24
2019	67	35	35
2020	67	22	42
2021	67	20	47
2022	67	16	51

Sumber: BPP Kecamatan Pangkalan Jambu 2022

Terjadinya pertambangan ilegal tidak lepas karena sumberdaya alam yang melimpah serta rendahnya literasi dan pengetahuan masyarakat tentang dampaknya. Ketika lahan sudah beralih fungsi, rusak dan emas tidak lagi banyak tersedia, masyarakat mulai kekurangan pendapatan serta kehilangan pekerjaannya sehingga masyarakat sadar dan mulai mengreklamasi lahan bekas pertambangan ilegal menjadi lahan sawah kembali. Selain itu masyarakat harus mematuhi hukum dan dorongan

pemerintah maka turut menjadi alasan masyarakat untuk mengubah lahan PETI tersebut menjadi lahan sawah kembali. Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Jambu mulai memperbaiki lahan bekas tambang ilegal untuk di jadikan sawah kembali, luas lahan yang sudah di jadikan sawah kembali dapat di lihat di Tabel 5.

Tabel 5. Data Luas Lahan PETI Yang Sudah di Kembalikan Menjadi Lahan Padi Sawah

No	Desa	Total Lahan PETI (Ha)	Sisa Lahan PETI (Ha)	Lahan Sawah PETI (Ha)	Jumlah Petani
1	Baru Pangkalan Jambu	67	16	51	47
2	Birun	75	75	0	0
3	Bukit Perentak	106	68,5	37,5	21
4	Kampung Limo	123	105	18	16
5	Sungai Jering	136	119	17	14
6	Bungo Tanjung	120	107	13	12
7	Tigo Alur	157	141	16	9
8	Tanjung Mudo	20	15	5	5
Jumlah		804	646,5	157,5	124

Sumber: BPP Kecamatan Pangkalan Jambu 2022

Tabel 5 menunjukkan masyarakat Kecamatan Pangkalan Jambu sudah mulai melakukan alih fungsi lahan tambang ilegal untuk di jadikan sawah kembali, dari data di atas Desa Baru Pangkalan Jambu merupakan desa yang sudah banyak melakukan alih fungsi lahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dibandingkan desa-desa lainnya sebanyak 51 ha. Artinya sebagian besar lahan-lahan bekas pertambangan yang ada di Desa Baru Pangkalan Jambu sudah mulai di alih fungsikan sebagai lahan padi sawah.

Hal ini tak luput dari peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang terlibat di Kecamatan Pangkalan Jambu, artinya dengan adanya peran PPL akan sangat membantu masyarakat dalam melakukan alih fungsi lahan tambang ilegal untuk di

jadikan lahan sawah kembali.

Berdasarkan uraian diatas, maka penlis ingin melakukan penelitian dengan judul, **“Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Pelaksanaan Reklamasi Usahatani Padi Sawah di Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin (kasus EKS Tambang Emas)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Penyuluhan dari PPL ini dapat dapat menjadi sarana sosialisasi kebijakan yang efektif untuk mendorong pembangunan pertanian dalam situasi petani tidak mampu mencapai tujuan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan. Sudah sejak lama pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat petani yang merupakan porsi terbesar dari struktur masyarakat Indonesia. (Suharto, 2005).

Penyuluhan dalam proses pemulihan sebagai proses pemberdayaan masyarakat, merupakan proses pemandirian masyarakat. Pemandirian bukanlah menggurui, dan juga bukan bersifat karitatif, melainkan mensyaratkan tumbuh dan berkembangnya partisipasi atau peran serta secara aktif dari semua pihak yang akan menerima manfaat penyuluhan, terutama masyarakat petani sendiri.

Desa Baru Pangkalan Jambu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Paangkalan Jambu Kabupaten Merangin, yang melakukan usahatani padi sawah di bekas lahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang paling banyak di bandingkan Desa-desa lainnya. Kegiatan petani berusahatani padi sawah di bekas lahan tambang ilegal ini di lakukan karena lahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sebelumnya merupakan lahan sawah dan lahan tersebut rusak tidak bisa di jadikan sawah dikarenakan semakin hari hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

menurun dan lahan sudah banyak rusak, sehingga masyarakat melakukan alih fungsi lahan menjadi sawah kembali.

Lahan-lahan bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang ada di Desa Baru Pangkalan Jambu mulai di alih fungsikan kembali menjadi sawah kembali dan mulai di datarkan kembali seperti sediakala sebelum di lakukan usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) mulai melakukan perbaikan lahan tersebut untuk di jadikan sawah kembali.

Peran PPL untuk pemulihan pertanian dalama usahatani padi sawah sangat penting dalam membantu masyarakat maupun petani. Dengan demikian diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat maupun para petani untuk dapat mengetahui bagaimana usaha pengambalian lahan tambang tersebut untuk di jadikan sawah kembali. Diharapkan, dengan adanya pengembalian lahan bekas tambang ini produksi padi sawah di Desa Baru Pangkalan Jambu menjadi meningkat kembali.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran reklamasi usahatani padi sawah di Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin (Kasus EKS Tambang Emas)?
2. Bagaimana peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam reklamaasi usahatani padi sawah di Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin (Kasus EKS Tambang Emas)?
3. Apakah ada hubungan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam reklamasi usahatani padi sawah di Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan

Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin (Kasus EKS Tambang Emas)?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam reklamasi usahatani padi sawah di Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin (Kasus EKS Tambang Emas).
2. Untuk mengetahui gambaran reklamasi usahatani padi sawah di Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin (Kasus EKS Tambang Emas).
3. Menganalisis hubungan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam reklamasi usahatani padi sawah di Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin (Kasus EKS Tambang Emas).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan ataupun rujukan selanjutnya bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait khususnya dalam melakukan kepentingan penelitian selanjutnya mengenai peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam reklamasi usahatani padi sawah.
3. Sebagai salah satu referensi bagi penelitian berikutnya atau sebagai bahan pustaka dalam menambah wawasan pengetahuan mengenai penelitian terkait.